

Mewariskan Integritas: Studi Komparatif Kejadian 27 dan Sila Kelima Pancasila dalam Membangun Budaya Antikorupsi

Putra Mario Alvian Alexander¹, Monica Tarore², Nelvin Zebua³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia

Correspondence: monica.tarore@reformedindonesia.ac.id

Abstract:

Corruption is a structural problem that hinders national progress and undermines social justice. In Indonesia's multicultural and religious context, the transmission of spiritual values plays a crucial role in shaping the character and ethics of society. This study aims to analyze and compare the moral values in the Genesis 27 narrative of Jacob's deception of Esau with the principles of social justice in the Fifth Principle of Pancasila, to illustrate the contribution of Christian faith to eradicating corruption. Using a comparative approach through literature review, this study finds that Genesis 27 contains a moral message regarding the consequences of manipulation, dishonesty, and damaged relationships, while the Fifth Principle emphasizes the importance of social justice for all Indonesians as the foundation of national ethics. The comparative analysis reveals a common ground between the two, namely an emphasis on integrity, moral responsibility, and a commitment to truth as the foundation of social life. Thus, personal integrity is the primary foundation for Christians in building an anti-corruption culture and actively participating in realizing a just, honest, and corruption-free society.

Keywords: Integrity; Genesis 27; The Fifth Principle of Pancasila; Anti-Corruption Culture; Christian Ethics

Abstrak:

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang menghambat kemajuan bangsa serta merusak tatanan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan religius, pewarisan nilai-nilai spiritual memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan etika publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan nilai-nilai moral dalam narasi Kejadian 27 kisah penipuan Yakub terhadap Esau dengan prinsip keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila, untuk menyoroti kontribusi iman Kristen dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan komparatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa Kejadian 27 mengandung pesan moral mengenai konsekuensi manipulasi, ketidakjujuran, dan rusaknya relasi, sementara Sila Kelima menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai landasan etika berbangsa. Hasil analisis komparatif menunjukkan adanya titik temu antara keduanya, yakni penekanan pada integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen terhadap kebenaran sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, integritas pribadi menjadi landasan utama bagi umat Kristen dalam membangun budaya anti-korupsi serta berperan aktif mewujudkan masyarakat yang adil, jujur, dan bebas dari korupsi.

Kata Kunci: Integritas; Kejadian 27; Sila Kelima Pancasila; Budaya Antikorupsi; Etika Kristen

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak multidimensional, baik secara ekonomi, sosial, hukum, maupun moral. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, yang meliputi praktik-praktik seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan gratifikasi. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi,”¹ yang dapat terjadi di sektor publik maupun swasta, dan mengakibatkan kerusakan serius pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Secara hukum di Indonesia, korupsi dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.² Definisi ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral individu, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang merugikan keuangan dan kedaulatan negara secara langsung.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi permasalahan struktural yang merambah hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari birokrasi pemerintahan, lembaga peradilan, dunia pendidikan, hingga pelayanan publik. Berbagai langkah pemberantasan korupsi telah dilakukan pemerintah melalui regulasi dan kebijakan, antara lain pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.³ Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, yang menekankan koordinasi lintas lembaga dalam upaya membangun budaya antikorupsi secara berkelanjutan serta kampanye budaya antikorupsi.⁴ Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih menghadapi tantangan serius, terutama karena lemahnya integritas di tingkat individu dan masyarakat.

Secara statistik, tingkat toleransi masyarakat terhadap korupsi masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK), Indonesia mencatat nilai 3,92 pada tahun 2023 dalam skala 0–5.⁵ Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih cukup permisif terhadap perilaku koruptif. Bahkan pada tahun 2024, skor tersebut mengalami penurunan menjadi 3,85, yang mencerminkan semakin melemahnya semangat antikorupsi dan meningkatnya sikap permisif masyarakat terhadap tindakan korupsi.

¹“Transparency International (TI),” Transparency.Org, accessed October 16, 2025, <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>.

² Yasmirah Mandasari Saragih, “Problematisasi Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi),” *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 76–86

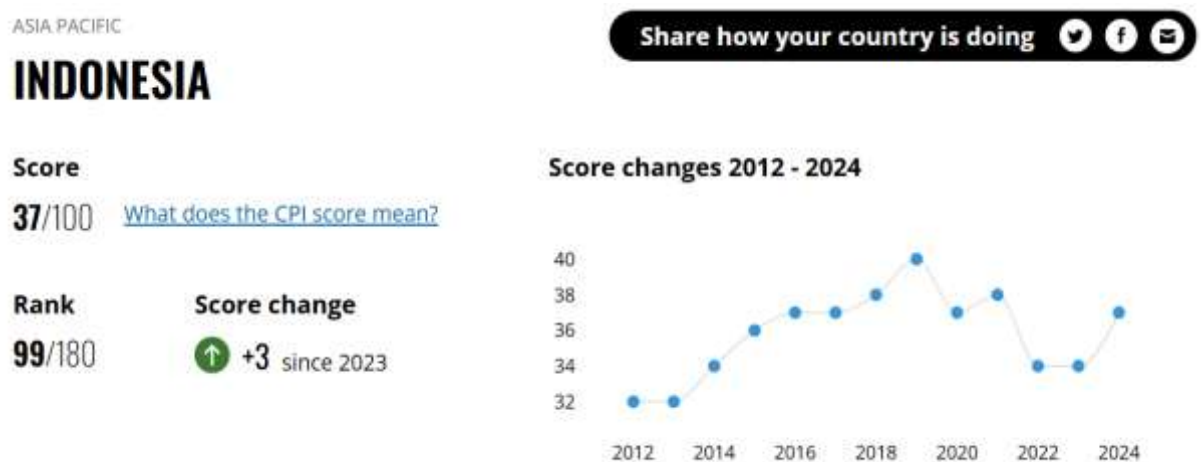
³ Sultan Zora Fernanda dan Idul Rishan, “Dampak Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Integritas* 10, no. 1 (2024): 1–18.

⁴ Firman Firdausi and M.N Romi A.S, “Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemerintahan Daerah (Studi di Pemerintah Kabupaten Probolinggo),” *REFORMASI* 9, no. 1 (June 2019): 66, <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i1.1324>.

⁵ “Indeks-Perilaku-Anti-Korupsi-2023,” n.d.

Lebih lanjut, posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Berdasarkan data Transparency International (2024), Indonesia memperoleh skor 37 dari 100, menempati peringkat ke-99 dari 180 negara.⁶ Nilai ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Rincian perkembangan skor CPI Indonesia dari tahun 2012 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perkembangan Skor CPI Indonesia, 2012–2024



Sumber: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2024

Data pada tabel tersebut menegaskan bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum, melainkan juga mencerminkan krisis moral dan lemahnya budaya integritas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga perlu disertai pendidikan karakter, internalisasi nilai-nilai etika, serta pendekatan spiritual dan budaya yang menyentuh akar persoalan.

Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa upaya ini tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan hukum dan kebijakan semata, melainkan juga memerlukan pendekatan nilai dan moral. Pendidikan agama dan etika menjadi bagian penting dalam membangun integritas dan budaya kejujuran. Dalam konteks ini, beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat tema kejujuran dan keadilan sosial, baik dari perspektif iman Kristen maupun dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila.

Dari sisi teologi, artikel oleh Seprianus L. Padakari dan Rezeki Putra Gulo yang berjudul “Teologi dan Keadilan Sosial: Peran Gereja dalam Merespons Ketimpangan Global”⁷ menyoroti bagaimana gereja berperan sebagai agen perubahan sosial yang berjuang melawan ketidakadilan. Dunia, menurut mereka, tengah mengalami ketimpangan

⁶ “2023 Corruption Perceptions Index: Explore the Results,” Transparency.Org, January 30, 2024, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

⁷ Seprianus L. Padakari dan Rezeki Putra Gulo, “Teologi dan Keadilan Sosial: Peran Gereja dalam Merespons Ketimpangan Global,” *Tumou Tou* 12, no. 1 (2025): 41–52, <https://doi.org/10.51667/tt.v12i1.1973>

dalam berbagai aspek seperti sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks ini, iman Kristen mendorong gereja untuk menghadirkan keadilan sebagai wujud nyata kasih Allah dalam masyarakat. Sementara itu, artikel “Hak Kesulungan: Kajian Historis Kejadian 25:19–34 dan Maknanya bagi GMIM Jemaat Golgota Bukit Ranomuut mengulas teks Alkitab secara historis, terutama kisah Yakub dan Esau.”⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa Esau mengabaikan makna rohani dari hak kesulungan, lebih mementingkan kebutuhan jasmani daripada nilai spiritual yang menyertainya, aspek moral dari transformasi Yakub menjadi fokus utama. Kisah ini menggarisbawahi bagaimana perubahan karakter dari penipu menjadi pribadi yang taat terjadi melalui proses pergumulan spiritual yang mendalam. Ini menjadi cerminan bahwa setiap pelanggaran membawa dampak, tetapi kasih Allah membuka jalan bagi pemulihan dan pertobatan sejati.

Dari perspektif etika Kristen, Sapto Sunariyanti menegaskan pentingnya pendidikan etika sejak dini untuk menanamkan nilai kejujuran dan membangun budaya anti-korupsi.⁹ Natanael Budiman Elia menambahkan bahwa tindakan korupsi adalah bentuk penolakan terhadap kehendak Allah serta merusak relasi sosial yang dikehendaki-Nya.¹⁰ Pendekatan ini memperlihatkan bahwa integritas bukan sekadar nilai sosial, melainkan juga merupakan ekspresi iman.

Di sisi lain, dari perspektif nilai-nilai Pancasila, penelitian oleh Olipian Resky Pernando yang menggarisbawahi pentingnya internalisasi Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam membentuk karakter generasi muda. Resky menekankan bahwa Pancasila, khususnya sila kelima, mengandung prinsip keadilan distributif yang mendorong solidaritas dan tanggung jawab sosial sebagai landasan membangun masyarakat yang berintegritas.¹¹

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas secara mendalam baik dari segi teologi Kristen maupun dari perspektif Pancasila. Namun demikian hingga kini, belum ditemukan penelitian yang secara langsung mengaitkan teks biblikal Kejadian 27 dengan sila ke-5 Pancasila dalam konteks etika kejujuran di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kedua pendekatan tersebut melalui pendekatan komparatif yang menegaskan peran iman Kristen dalam membentuk budaya kejujuran sebagai kontribusi nyata umat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan melakukan studi literatur. Studi komparatif dipilih untuk menganalisis dan membandingkan nilai-nilai moral

⁸ Theresia Yashinta Tiara Lembong and Ferry S. Lumintang, “Hak Kesulungan: Kajian Historis Kejadian 25:19–34 dan Maknanya bagi GMIM Jemaat Golgota Bukit Ranomuut,” *Educatio Christi* 4, no. 1 (November 2024): 16–32, <https://doi.org/10.70796/educatio-christi.v4i1.84>.

⁹ Sapto Sunariyanti, “Penerapan Etika Kristen dalam Pendidikan Anti Korupsi di Keluarga,” *SANCTUM DOMINE: Jurnal Teologi* 7, no. 1 (2018): 107–120. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46>

¹⁰ Natanael Budiman Elia, “Mengkonstruksi Etika Kristiani tentang Korupsi dan Sikap Anti-Korupsi melalui Lensa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru,” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 7, no. 2 (November 2023): 104–18, <https://doi.org/10.37368/ja.v7i2.517>.

¹¹ Olipian Resky Pernando et al., “Penerapan Nilai Nilai Etika dan Pancasila Untuk Mewujudkan Kehidupan Anti Korupsi di Kalangan Generasi Z,” *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia* 1, no. 4 (December 2024): 58–66, <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v1i4.78>.

dan etika yang terkandung dalam Kejadian 27 sebagai teks Alkitabiah dengan Sila ke-5 Pancasila, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi dan peran umat Kristen. Pendekatan ini akan menggali persamaan, perbedaan, serta resonansi value yang relevan dalam membentuk kesadaran dan sikap kejujuran serta keadilan sosial. Data diperoleh melalui telaah teks dan dokumen, meliputi Alkitab, kitab tafsir, dokumen Pancasila, serta literatur terkait etika Kristen dan pemberantasan korupsi. Analisis dilakukan dengan interpretasi dan perbandingan teks, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip moral yang dapat dijadikan landasan etis bagi pembentukan budaya kejujuran dan keadilan sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendalaman Konteks Moral Yakub: Perjalanan dan Transformasi Hidup

Kisah Yakub tidak hanya berhenti pada Kejadian 27 saja, tetapi juga berakar bahkan sejak kelahirannya dalam Kejadian 25:26, ketika ia lahir sambil memegang tumit Esau.¹² Tindakan ini secara simbolis menggambarkan kecenderungan manusia untuk bersaing dan ingin mendahului orang lain demi mendapatkan sesuatu. Dalam perspektif moral, hal ini mencerminkan sifat ambisius manusia yang kerap mengandalkan kekuatannya sendiri untuk meraih berkat, tanpa menunggu cara dan waktu Tuhan. Sikap “memegang tumit” ini menjadi gambaran awal dari perjuangan moral manusia terhadap kejujuran dan kesetiaan pada kehendak Allah.

Perjalanan hidup Yakub selanjutnya memperlihatkan konsekuensi dari sikapnya. Saat ia bekerja di rumah mertuanya, Laban Kejadian 29–31, Yakub sendiri mengalami ketidakjujuran yang serupa. Laban menipunya dengan menggantikan Rahel dengan Lea pada malam pernikahan, serta berkali-kali mempermainkan upah kerjanya. Namun, Yakub pun melakukan siasat tersendiri dengan memilih kambing domba berpola tertentu agar kekayaannya bertambah.¹³ Narasi ini memperlihatkan bahwa ketidakjujuran melahirkan siklus ketidakadilan yang terus berulang: siapa yang menipu pada akhirnya juga akan mengalami penipuan.

Dari sini tampak bahwa kejujuran bukan hanya persoalan etika individu, melainkan juga sistem sosial. Ketika relasi diwarnai tipu daya dan manipulasi, keadilan sosial menjadi mustahil terwujud. Namun, perubahan moral Yakub terjadi ketika ia berdamai dengan Esau (Kejadian 33). Transformasi moral Yakub ini menunjukkan bahwa kejujuran, kerendahan hati, dan rekonsiliasi adalah nilai yang perlu diwariskan agar masyarakat memahami pentingnya integritas dan keadilan dalam kehidupan sosial

Nilai Moral dalam Kejadian 27

Kisah Kejadian 27 menceritakan peristiwa ketika Ribka dan Yakub menipu Ishak ayah nya untuk memperoleh berkat yang akan diberikan kepada Esau. Peristiwa ini menggambarkan pergulatan manusia antara keinginan memperoleh berkat atay

¹² “Genesis 25:26 Meaning and Commentary - Bible Repository,” accessed November 29, 2025, <https://biblerepository.com/genesis-2526/>.

¹³ Jeff Barlatier, “Laban: The Mirror of Jacob’s Soul,” *Medium*, June 23, 2025, <https://medium.com/@jeffreybarlatier/labon-the-mirror-of-jacobs-soul-fe51518affd8>

keuntungan dan tuntutan untuk hidup dalam kejujuran di hadapan Allah. Dari kisah ini dapat diidentifikasi beberapa nilai moral yang relevan:

1. Keadilan

Tindakan Yakub dan Ribka merugikan Esau secara langsung. Esau kehilangan hak berkatnya, karena rekayasa manusia yang mengabaikan keadilan. Dalam konteks moral, perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan hak orang lain merupakan bentuk ketidakadilan yang menggerus tatanan sosial.¹⁴ Hal ini menjadi peringatan bahwa dosa yang dilakukan demi keuntungan pribadi selalu membawa kerugian bagi sesama.

2. Solidaritas dan kepedulian sosial

Yakub tidak bertindak demi kepentingan bersama, melainkan demi dirinya dan kelompok keluarganya. Sebagai contoh bagaimana kita lihat dalam kisahnya Yakub berkerjasama dengan Ribka, ibunya.¹⁵ Sikap ini menggambarkan egoisme yang menolak prinsip kasih dan solidaritas yang diajarkan Allah. Dalam konteks sosial modern, tindakan serupa tampak dalam praktik korupsi ketika seseorang memanfaatkan kekuasaan atau posisi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Alkitab menolak perilaku semacam ini karena bertentangan dengan kehendak Allah yang menuntut keadilan bagi semua.

3. Integritas dan kejujuran

Kisah Kejadian 27 menunjukkan bagaimana kebohongan menjadi pintu masuk bagi kehancuran relasi, baik antara manusia maupun antara manusia dan Allah.¹⁶ Ketidakjujuran tidak hanya menimbulkan dampak sosial, tetapi juga spiritual, karena merusak kepercayaan dan mencederai kebenaran yang merupakan karakter Allah sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa berkat yang diperoleh melalui ketidakjujuran tidak akan pernah membawa damai sejahtera sejati.

Prinsip Keadilan Sosial dalam Sila Kelima Pancasila

Sebagaimana Kejadian 27, sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan puncak dari keseluruhan sistem nilai Pancasila yang mencerminkan cita-cita kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Keadilan sosial tidak hanya berbicara tentang distribusi ekonomi atau kebijakan publik, tetapi juga menyangkut kesadaran moral dan tanggung jawab etis setiap warga negara. Nilai ini mengajak masyarakat untuk hidup dalam semangat kesetaraan, solidaritas, dan kejujuran, sehingga setiap orang dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan bermartabat. Dalam konteks moral, keadilan sosial menuntut keutuhan hati nurani serta kejujuran dalam bertindak. Soenaryo menegaskan bahwa "keadilan dalam Pancasila menuntut kejujuran batiniah dan kesadaran moral warga negara untuk menolak segala bentuk penyelewengan kekuasaan."¹⁷ Pernyataan ini

¹⁴ Stevanus Parinussa dan Yusuf Slamet Handoko, "Teologi Kontekstual dalam Era Polarisasi Politik dan Krisis Demokrasi," *DOREA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2025): 73–85.

¹⁵ "Blessing: Not a Zero-Sum Game | Reform Judaism," accessed November 29, 2025, <https://reformjudaism.org/learning/torah-study/torah-commentary/blessing-not-zero-sum-game>.

¹⁶ "Genesis 27:1-28:5 | United Church of God," accessed November 29, 2025, <https://www.ucg.org/learn/bible-study-tools/bible-commentary/beyond-today-bible-commentary-genesis/genesis-271-285>.

¹⁷ Soenaryo, "Pancasila dan Prinsip-Prinsip Keadilan." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 18, no. 1 (2013): 25–57.

menunjukkan bahwa sila kelima tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang menuntun perilaku manusia menuju integritas dan kebenaran.

Dengan demikian, prinsip keadilan sosial berfungsi sebagai pedoman etis bagi kehidupan berbangsa. Ketika nilai kejujuran menjadi dasar dalam pelaksanaan keadilan, maka penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, dan korupsi dapat ditekan. Keadilan sosial yang sejati tidak dapat dipisahkan dari kejujuran dan tanggung jawab sosial, karena tanpa dua nilai itu, kesejahteraan bersama akan berubah menjadi kepentingan kelompok tertentu saja. Nilai-nilai ini sejalan dengan pandangan iman Kristen yang menekankan kasih, kebenaran, dan tanggung jawab sosial sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, sila kelima tidak hanya menjadi dasar filosofis bangsa Indonesia, tetapi juga ruang bagi iman Kristen untuk berkontribusi dalam membangun budaya kejujuran dan menolak segala bentuk korupsi.

1. Kepedulian Sosial dan Tanggung Jawab Kolektif

Prinsip keadilan sosial menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama serta tanggung jawab kolektif. Warga negara diajak untuk hidup dalam semangat solidaritas, kesetaraan, dan saling mendukung, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil dan bermartabat. Nilai moral ini selaras dengan peringatan dalam Kejadian 27 bahwa egoisme dan manipulasi demi keuntungan pribadi atau kelompok mengabaikan hak dan kesejahteraan orang lain. Seperti dijelaskan Herawati bahwa keadilan sosial harus diterapkan di setiap bidang kehidupan sosial-ekonomi dan politik tanpa diskriminasi. Semua kegiatan pribadi yang bertentangan dengan prinsip ini, seperti monopoli, nepotisme, dan konspirasi, seharusnya tidak memiliki ruang dalam pembangunan nasional.¹⁸

2. Transparansi, Integritas, dan Menolak Kolusi/Korupsi

Kejujuran dan integritas menjadi dasar penerapan keadilan sosial. Seperti Yakub yang menipu demi memperoleh berkat, penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks sosial dapat merugikan masyarakat luas. Soenaryo menegaskan bahwa: Keadilan dalam Pancasila menuntut kejujuran batiniah dan kesadaran moral warga negara untuk menolak segala bentuk penyelewengan kekuasaan.¹⁹ Dengan menegakkan transparansi dan integritas, praktik kolusi dan korupsi dapat ditekan, sehingga keadilan sosial dapat berjalan secara nyata.

3. Kepedulian terhadap Kesejahteraan Publik dan Budaya Anti-Korupsi

Sila kelima menuntut tanggung jawab sosial yang konkret: memperjuangkan kesejahteraan publik dan membangun budaya anti-korupsi. Bua, Samiyono, dan Tampake menegaskan bahwa Keadilan sosial dari perspektif Sila Kelima Pancasila adalah keadilan politik dan ekonomi dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotong-royong serta semua

¹⁸ Yunie Herawati, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila (The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila)," *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan* 18, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.31315/paradigma.v18i1.2405>.

¹⁹ Soenaryo. "Pancasila dan Prinsip-Prinsip Keadilan." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 18, no. 1 (2013): 25-57.

untuk semua.”²⁰ Ketika kejujuran menjadi landasan pengambilan keputusan publik, setiap kebijakan diarahkan pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu, sejalan dengan prinsip kasih dan kebenaran dalam iman Kristen.

Analisis Komparatif: Kejadian 27 dan Sila Kelima

1. Persamaan Kejadian 27 dan Sila Kelima

Kejadian 27 dan Sila kelima Pancasila memiliki sejumlah persamaan konseptual yang menunjukkan bahwa kedua sumber nilai meskipun berasal dari konteks yang berbeda, namun sama-sama menekankan pentingnya integritas moral sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Persamaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

Pertama, keduanya menekankan prinsip keadilan sebagai nilai dasar. Dalam Kejadian 27, tindakan manipulatif yang dilakukan Yakub dan Ribka menyebabkan ketidakadilan yang merugikan Esau, sehingga menegaskan bahwa ketidakjujuran selalu menimbulkan konsekuensi sosial. Demikian pula, Sila kelima menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia, yang menuntut bahwa setiap tindakan harus mengedepankan kesejahteraan dan hak seluruh rakyat. Dengan demikian, baik teks Alkitab maupun Pancasila menolak segala bentuk perilaku yang menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain.

Kedua, keduanya menyoroti pentingnya kepedulian sosial dan tanggung jawab kolektif. Kisah Kejadian 27 menunjukkan bahwa egoisme Yakub dan Ribka tidak hanya melukai Esau tetapi merusak relasi keluarga secara keseluruhan. Tindakan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi menciptakan ketidakharmonisan komunitas. Hal ini sejalan dengan Sila kelima yang menuntut solidaritas sosial, tanggung jawab publik, dan kesediaan untuk bertindak demi kebaikan bersama. Dengan kata lain, baik Kejadian 27 maupun Pancasila mengajarkan bahwa komunitas hanya dapat maju apabila setiap anggota mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi.

Ketiga, kejujuran dan integritas muncul sebagai nilai sentral bagi pembentukan masyarakat yang berkeadilan. Ketidakjujuran Yakub melahirkan kerusakan relasi, menegaskan bahwa penipuan bukan hanya dosa moral, tetapi juga pelanggaran terhadap karakter Allah yang adalah sumber kebenaran. Prinsip ini paralel dengan Pancasila yang mengharuskan transparansi, keterbukaan, dan penolakan terhadap korupsi sebagai syarat tercapainya keadilan sosial. Keduanya memandang kejujuran sebagai fondasi yang tidak dapat dinegosiasikan dalam membangun kehidupan bersama.

Keempat, keduanya menekankan dimensi transformasi moral yang berdampak sosial. Kisah Yakub tidak berhenti pada tindakan penipuan, tetapi berlanjut pada proses transformasi diri ketika ia berdamai dengan Esau. Transformasi ini menjadi model bahwa perubahan pribadi berkontribusi pada pemulihan komunitas. Sementara itu, Sila kelima mengarahkan bangsa Indonesia kepada pembentukan budaya keadilan dan etika publik melalui pendidikan nilai. Dengan demikian, keduanya menegaskan bahwa pembentukan karakter individu merupakan langkah awal untuk menciptakan tatanan sosial yang bermartabat.

²⁰ Piter Randan Bua, David Samiyono, and Tony Christian Tampake, “Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif Dari Sila Kelima Pancasila,” *KURIOS* 5, no. 2 (November 2019): 109–24, <https://doi.org/10.30995/kur.v5i2.97>.

Dengan melihat persamaan-persamaan tersebut, jelas bahwa baik Kejadian 27 maupun Sila kelima memandang integritas pribadi sebagai pondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Keselarasan nilai ini memberikan dasar etis yang kuat bagi umat Kristen untuk berperan aktif dalam membangun budaya kejujuran dan memberantas korupsi di Indonesia.

2. Perbedaan Kejadian 27 dan Sila Kelima

Meskipun Kejadian 27 dan Sila kelima Pancasila memiliki kesamaan nilai moral, keduanya berbeda secara signifikan dalam konteks, ruang lingkup, dan pendekatan etis yang digunakan.

Pertama, perbedaan konteks dan sifat normatif. Kejadian 27 berada dalam konteks narasi teologis yang menggambarkan dinamika keluarga Yakub-Esau, sehingga nilai moralnya disampaikan melalui kisah personal dan relasional. Sebaliknya, Sila kelima merupakan prinsip normatif-filosofis negara yang dirancang untuk mengatur tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa secara kolektif. Dengan demikian, Kejadian 27 bersifat partikular dan naratif, sedangkan Sila kelima bersifat universal dan institusional.

Kedua, ruang lingkup implementasinya berbeda. Kejadian 27 menunjukkan konsekuensi moral dari ketidakjujuran pada level individu dan keluarga relasi antara Yakub, Esau, Ribka, dan Ishak. Sementara itu, Sila kelima memiliki cakupan luas yang mengatur perilaku warga negara dalam berbagai sektor publik, termasuk pemerintahan, ekonomi, kebijakan publik, dan sistem sosial. Karena itu, nilai keadilan dalam Kejadian 27 bersifat interpersonal, sedangkan dalam Sila kelima bersifat sosial-struktural.

Ketiga, perbedaan konsekuensi moral dan sosial. Ketidakjujuran Yakub mengakibatkan kerusakan relasi pribadi dan ketegangan spiritual di hadapan Allah, sehingga sanksinya bersifat moral dan relational. Sebaliknya, pelanggaran nilai keadilan sosial dalam Sila kelima tidak hanya membawa dampak sosial, tetapi juga implikasi hukum, administratif, dan ekonomi bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, Kejadian 27 berfokus pada dampak moral-spiritual, sedangkan Sila kelima pada dampak sosial-juridis.

Keempat, pendekatan pedagogis dan mekanisme penerapan nilai berbeda secara mendasar. Kejadian 27 menggunakan pendekatan naratif menekankan refleksi, pertobatan, dan transformasi pribadi sebagai jalan menuju integritas. Sementara itu, Sila kelima mengedepankan pendekatan normatif dan institusional melalui pendidikan karakter, regulasi, serta mekanisme pengawasan sosial untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, Kejadian 27 lebih menekankan perubahan internal, sedangkan Sila kelima menekankan pembentukan sistem yang adil.

Secara keseluruhan, meskipun keduanya bertujuan membangun nilai kejujuran dan tanggung jawab moral, Kejadian 27 bekerja pada level spiritual-personal, sedangkan Sila kelima bekerja pada level sosial-institusional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi: nilai iman membentuk hati nurani individu, sementara nilai Pancasila mengatur struktur kehidupan bersama.

3. Integrasi Kejadian 27 dan Sila Kelima

Kisah Kejadian 27 dan prinsip keadilan sosial dalam Sila kelima Pancasila memiliki

titik temu dalam penekanan pada kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai dasar kehidupan bermoral. Walaupun lahir dari konteks yang berbeda yaitu teologi Kristen dan filsafat kebangsaan, keduanya berpadu dalam visi etis yang sama: membentuk manusia berintegritas dan menolak segala bentuk ketidakadilan yang merugikan sesama.

Kejadian 27 menekankan transformasi moral bahwa berkat yang diperoleh secara curang tidak membawa damai, sementara Sila kelima menekankan perlunya mekanisme sosial, institusi, dan perilaku publik yang menjamin keadilan bagi semua. Keduanya bersuara serempak bahwa budaya kejujuran adalah fondasi bagi pemberantasan korupsi dan pembangunan masyarakat yang bermartabat.

Aspek Nilai	Kejadian 27	Sila Kelima	Integrasi & Relevansi Anti-Korupsi
Kejujuran & Integritas	Kisah Yakub menipu Ishak dan Esau menunjukkan bahwa ketidakjujuran menghasilkan konflik, ketidakadilan, dan rusaknya relasi.	Menuntut kejujuran, transparansi, dan integritas sebagai dasar keadilan sosial.	Menegaskan bahwa tanpa integritas pribadi, keadilan sosial mustahil terwujud; korupsi lahir dari ketidakjujuran dalam relasi sosial maupun sistem.
Keadilan	Penipuan Yakub merampas hak Esau dan mencederai nilai keadilan dalam keluarga.	Prinsip distribusi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi.	Baik Alkitab maupun Pancasila menolak tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain; ini menjadi dasar etis melawan korupsi.
Tanggung Jawab Moral	Kisah Yakub menekankan konsekuensi moral dan spiritual dari tindakan curang.	Menuntut tanggung jawab warga dalam menjunjung keadilan sosial dan menolak penyalahgunaan kekuasaan.	Keduanya menegaskan bahwa perilaku individu berdampak pada komunitas; korupsi lahir dari kegagalan tanggung jawab moral.
Pembentukan karakter dan relasi sosial	Perjalanan hidup Yakub menunjukkan	Menekankan pembinaan karakter warga	Keduanya menekankan pembentukan

	pertobatan dan rekonsiliasi sebagai proses pembentukan karakter.	negara melalui nilai keadilan dan solidaritas.	manusia yang berintegritas sebagai fondasi budaya anti-korupsi
--	--	--	--

Implikasi Teologis dan Sosial

1. Implikasi Teologis

Secara teologis, kisah Kejadian 27 mengingatkan bahwa Allah menghendaki umat-Nya hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Dosa Yakub bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan pelanggaran terhadap relasi dengan Allah. Sebaliknya, tindakan korupsi yang hanya fokus pada diri sendiri bertentangan dengan kehendak Allah. Namun, melalui proses pertobatan dan rekonsiliasi dengan Esau, Yakub mengalami transformasi spiritual yang menegaskan bahwa kasih karunia Allah mampu memulihkan manusia yang jatuh dalam ketidakjujuran. Nilai ini menegaskan bahwa iman Kristen menuntun umat untuk bertumbuh dalam integritas moral sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

Dalam konteks *koinonia*, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang menumbuhkan semangat kejujuran dan anti-korupsi. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat persekutuan rohani, tetapi juga sebagai ruang pembinaan moral yang membentuk umat agar berani melawan godaan untuk berbuat curang dan tidak adil.²¹ Selanjutnya ditegaskan bahwa gereja memiliki tanggung jawab publik untuk menghadirkan nilai-nilai kebenaran Allah di tengah masyarakat yang korupsi. Oleh karena itu, gereja perlu mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran dalam pelayanan dan pendidikan iman, sehingga umat dibentuk menjadi agen perubahan sosial. Ketika gereja hidup setia pada nilai kebenaran dan keadilan, ia tidak hanya menegaskan identitasnya sebagai tubuh Kristus, tetapi juga berkontribusi nyata bagi kehidupan bangsa dalam semangat Sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Implikasi Sosial

Secara sosial, nilai-nilai yang digali dari Kejadian 27 dan Sila kelima dapat diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nilai kejujuran yang diajarkan melalui kisah Yakub menegaskan pentingnya integritas pribadi dan keadilan sosial dalam kehidupan bersama. Dalam dunia pendidikan, integrasi antara nilai kejujuran dan keadilan sosial dapat diwujudkan melalui pendidikan karakter yang menumbuhkan kesadaran etis peserta didik. Maka, gereja harus mengambil peran penting dalam situasi ini.²² Nilai ini sejalan dengan temuan yang menegaskan bahwa religiusitas tidak hanya berpengaruh pada moral pribadi, tetapi juga berperan sebagai kompas moral kolektif yang membentuk dinamika sosial dan institusional. Dengan kata lain, kejujuran yang bersumber dari iman memiliki daya transformatif dalam menciptakan budaya sosial yang transparan dan akuntabel.

Dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik, umat Kristen dipanggil untuk

²¹ Natanael Budiman Elia, "Mengkonstruksi Etika Kristiani Tentang Korupsi Dan Sikap Anti-Korupsi Melalui Lensa Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 7, no. 2 (November 2023): 104–18, <https://doi.org/10.37368/ja.v7i2.517>.

²² Stevanus Parinussa dan Yusuf Slamet Handoko, "Pembinaan Karakter Kristen Bagi Warga Gereja Dewasa," *DOREA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (2024): 51–64.

menjadi teladan dalam bekerja dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Maulidi dan kawan-kawan juga menekankan bahwa integrasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam sistem sosial merupakan pendekatan yang lebih efektif dalam memberantas korupsi dibanding pengawasan hukum semata. Keteladanan di ruang publik menjadi wujud nyata dari kesaksian iman: seorang Kristen yang menolak suap, bekerja dengan integritas, dan memperjuangkan keadilan sosial sedang menghidupi nilai-nilai Pancasila sekaligus ajaran Kristus. Iman Kristen memberi dimensi spiritual bagi implementasi nilai-nilai kebangsaan, sedangkan Pancasila menyediakan kerangka sosial bagi penerapan iman dalam kehidupan bernegara.²³

Melalui integrasi ini, terbentuklah budaya kejujuran yang tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga struktural. Ketika umat Kristen hidup jujur dalam lingkup keluarga, gereja, dan masyarakat, maka tercipta ekosistem sosial yang mendukung cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, iman Kristen memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa yang berkeadilan, bermartabat, dan bebas dari korupsi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang terkandung dalam kisah *Kejadian 27* dan prinsip keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila memiliki kesamaan yang mendasar dalam menegakkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai fondasi kehidupan bermoral. Meskipun berasal dari konteks yang berbeda iman Kristen dan ideologi kebangsaan keduanya berpadu dalam visi yang sama, yaitu membentuk manusia yang berintegritas dan menolak segala bentuk ketidakadilan, termasuk praktik korupsi.

Melalui analisis terhadap kisah Yakub, penelitian ini menegaskan bahwa ketidakjujuran selalu membawa kerusakan relasi, baik dengan sesama maupun dengan Allah. Namun, pertobatan Yakub menjadi bukti bahwa kejujuran dan kerendahan hati dapat memulihkan kehidupan dan menghadirkan damai sejahtera. Nilai ini sejalan dengan semangat Sila kelima Pancasila yang menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kejujuran dan tanggung jawab menjadi syarat utama bagi terciptanya kesejahteraan bersama.

Integrasi nilai-nilai dari kedua sumber tersebut memiliki implikasi praktis dalam kehidupan beriman dan berbangsa. Dalam konteks gereja, kejujuran dan tanggung jawab perlu ditanamkan melalui pendidikan iman, pembinaan karakter, dan keteladanan hidup. Dalam konteks sosial, umat Kristen dipanggil untuk menjadi pelaku keadilan dan pembawa terang dalam ruang publik, menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, serta memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, mewariskan budaya kejujuran bukan hanya tanggung jawab moral individu, tetapi juga panggilan iman dan kewajiban sosial. Iman Kristen memberikan dasar spiritual bagi pembentukan karakter yang jujur dan adil, sedangkan Pancasila memberikan arah etis bagi penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sinergi antara keduanya menjadi landasan kuat bagi umat Kristen untuk

²³ Ach Maulidi, Muhammad Wisnu Girindratama, Bonnie Soeherman, dan Fidelis Arastyo Andono, "Organizational Culture, Power Distance and Corruption: The Mediating Role of Religiosity," *The Indonesian Accounting Review* 14, no. 2 (2025): 203–221, <https://doi.org/10.14414/tiar.v14i2.4795>

berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dan membangun bangsa yang berkeadilan, berintegritas, dan berlandaskan kebenaran.

REFERENSI

- Barlatier, Jeff. "Laban: The Mirror of Jacob's Soul." *Medium*, June 23, 2025.
<https://medium.com/@jeffreylbarlatier/labon-the-mirror-of-jacobs-soul-fe51518affd8>
- "Blessing: Not a Zero-Sum Game | Reform Judaism." Accessed November 29, 2025.
<https://reformjudaism.org/learning/torah-study/torah-commentary/blessing-not-zero-sum-game>.
- Bua, Piter Randan, David Samiyono, and Tony Christian Tampake. "Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif Dari Sila Kelima Pancasila." *KURIOS* 5, no. 2 (November 2019): 109–24. <https://doi.org/10.30995/kur.v5i2.97>.
- Elia, Natanael Budiman. "Mengkonstruksi Etika Kristiani tentang Korupsi dan Sikap Anti-Korupsi melalui Lensa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 7, no. 2 (November 2023): 104–18. <https://doi.org/10.37368/ja.v7i2.517>.
- Fernanda, Sultan Zora, dan Idul Rishan. "Dampak Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Integritas* 10, no. 1 (2024): 1–18.
- Firdausi, Firman, and M.N Romi A.S. "Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemerintahan Daerah (Studi di Pemerintah Kabupaten Probolinggo)." *REFORMASI* 9, no. 1 (June 2019): 66. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i1.1324>.
- "Genesis 25:26 Meaning and Commentary - Bible Repository." Accessed November 29, 2025. <https://biblerepository.com/genesis-2526/>.
- "Genesis 27:1-28:5 | United Church of God." Accessed November 29, 2025.
<https://www.ucg.org/learn/bible-study-tools/bible-commentary/beyond-today-bible-commentary-genesis/genesis-271-285>.
- Herawati, Yunie. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila (The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila)." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan* 18, no. 1 (2014).
<https://doi.org/10.31315/paradigma.v18i1.2405>.
- Lembong, Theresia Yashinta Tiara, and Ferry S. Lumintang. "Hak Kesulungan: Kajian Historis Kejadian 25:19–34 dan Maknanya bagi GMIM Jemaat Golgota Bukit Ranomuut." *Educatio Christi* 4, no. 1 (November 2024): 16–32.
<https://doi.org/10.70796/educatio-christi.v4i1.84>.
- Maulidi, Ach, Muhammad Wisnu Girindratama, Bonnie Soeherman, dan Fidelis Arastyo Andono. "Organizational Culture, Power Distance and Corruption: The Mediating

- Role of Religiosity." *The Indonesian Accounting Review* 14, no. 2 (2025): 203–221.
<https://doi.org/10.14414/tiar.v14i2.4795>
- Olipian Resky Pernando, Ilma Amelia, Naiya Aulia Putri, Nahda Ananda Putri, Anis Karlina, and Ilham Hudi. "Penerapan Nilai Nilai Etika dan Pancasila Untuk Mewujudkan Kehidupan Anti Korupsi di Kalangan Generasi Z." *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia* 1, no. 4 (December 2024): 58–66.
<https://doi.org/10.61132/jupenkei.v1i4.78>
- Padakari, Seprianus L., dan Rezeki Putra Gulo. "Teologi dan Keadilan Sosial: Peran Gereja dalam Merespons Ketimpangan Global." *Tumou Tou* 12, no. 1 (2025): 41–52. <https://doi.org/10.51667/tt.v12i1.1973>
- Parinussa, Stevanus dan Yusuf Slamet Handoko. "Pembinaan Karakter Kristen Bagi Warga Gereja Dewasa," *DOREA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (2024): 51–64.
- Parinussa, Stevanus dan Yusuf Slamet Handoko. "Teologi Kontekstual dalam Era Polarisasi Politik dan Krisis Demokrasi." *DOREA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2025): 73–85.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. "Problematisasi Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 76–86
- Soenaryo. "Pancasila dan Prinsip-Prinsip Keadilan." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 18, no. 1 (2013): 25–57. <https://doi.org/10.25170/respons.v18i01.745>
- Sunariyanti, Sapto. "Penerapan Etika Kristen dalam Pendidikan Anti Korupsi di Keluarga." *SANCTUM DOMINE: Jurnal Teologi* 7, no. 1 (2018): 107–120.
<https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46>
- Transparency.Org. "2024 Corruption Perceptions Index: Explore the Results." January 30, 2024. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.